

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



source : Instagram-marsinahid



Zainul Abidin

Research Associate -
The Reform Initiatives (TRI)

Siapa Bilang Dollar Tidak Masuk Dapur?

i jutaan dapur Indonesia, minyak mulai berdesis di atas wajan. Tahu dipotong, asap mengepul, hari dimulai seperti biasanya. Sabtu 16 Mei 2026 di Nganjuk, Jawa Timur, sebuah upacara berlangsung di depan sebuah museum. Museum itu menyimpan nama seorang perempuan bernama Marsinah, buruh pabrik yang pada 1993 ditemukan tewas setelah ia berani berdiri di depan menuntut kenaikan upah dan menolak pemecatan sewenang-wenang perusahaan terhadap rekannya. Namun, Marsinah tidak mendapatkan upahnya, justru ia mendapatkan kematiannya.

Berhari-hari sebelumnya, rupiah sudah jadi bahan keluhan dari masyarakat, karena setiap harinya terus melemah. Obrolan ini sudah sangat ramai di warung, di grup WhatsApp, dan juga linimasa media sosial. Namun, di depan museum itu, di depan nama perempuan yang mati karena memintanya, Prabowo tidak menyampaikan kekhawatiran yang sama, bukan pula janji. Yang terdengar justru sebuah counter, seakan mengatakan: sudahlah, kalian berlebihan. "Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok. Iya kan?"

Pernyataan ini, membuat publik memuncak amarahnya. Namun, tidak sedikit yang sudah terlalu capek untuk bereaksi apapun, karena sudah lelah setiap hari dihadapkan dengan pernyataan pemerintah yang ngawur. Tapi di dapur-dapur itu, pagi tetap pagi. Tahu tetap harus digoreng, anak-anak tetap harus sarapan, hidup tetap harus jalan. Dan tahu yang mendesis di atas minyak itu sudah menyentuh dollar berkali-kali sebelum sampai ke sana.

Tidak Semua Salah, Tapi Tidak Semua Benar

Perlu diakui dengan jujur, penguatan dollar terhadap rupiah memang tidak sepenuhnya kabar buruk. Bagi eksportir komoditas, rupiah yang lemah adalah berkah. Setiap dollar hasil ekspor sawit, batu bara, karet, dan kopi dikonversikan menjadi lebih banyak rupiah. Sektor pariwisata pun diuntungkan karena wisatawan asing mendapat nilai lebih besar dari setiap dollar yang mereka belanjakan di Indonesia. Dalam logika kelompok ini, kalimat Presiden masuk akal, bahkan terasa menyenangkan.

Tapi kemudian muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari: siapa yang berada di kelompok itu, dan berapa jumlah mereka? Eksportir komoditas besar dan pelaku wisata premium adalah minoritas dalam struktur ekonomi Indonesia. Yang mayoritas adalah industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor, jutaan pekerja di sektor tekstil, farmasi, dan kimia yang terancam PHK ketika biaya produksi melonjak, serta seluruh konsumen rumah tangga yang membeli barang-barang yang satu per satu terhubung ke dollar. Bahkan negara pun ikut menanggung setiap pelemahan rupiah Rp100 per dollar langsung menambah defisit anggaran negara sebesar Rp 800 miliar, tekanan yang ujungnya bisa memotong ruang belanja sosial yang paling dibutuhkan masyarakat.

Izinkan saya membuktikannya. Mari kita ikuti perjalanan sebungkus tahu itu dari awal. Bahan bakunya adalah kedelai. Dan kedelai yang masuk ke pabrik tahu di Indonesia, dengan sangat besar kemungkinan, bukan berasal dari ladang petani Jawa atau Sulawesi. Ia berasal dari pertanian besar di Iowa atau Kansas, bisa juga dari padang panen raksasa di Mato Grosso, Brasil. Indonesia mengimpor lebih dari 85 persen kebutuhan kedelainya, dan selama puluhan tahun, Amerika Serikat menjadi pemasok utama dengan kontribusi 91 persen dari total impor nasional.

Kedelai itu ditimbang, dikemas, dimuat ke kapal kargo di pelabuhan Houston atau Santos, lalu berlayar menuju Rotterdam untuk transit, atau langsung ke Tanjung Priok di Jakarta. Seluruh transaksinya, dari harga per bushel di Chicago Board of Trade, ongkos pengapalan, biaya asuransi, hingga landed cost di dermaga, dihitung dalam dollar Amerika Serikat.

Di sinilah rupiah mulai bicara. Ketika rupiah melemah, importir harus menukarkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan jumlah dollar yang sama. Meskipun harga kedelai global sedang turun karena melimpahnya pasokan dari Brasil dan Argentina, penurunan itu tidak bisa dinikmati sepenuhnya. Setiap penurunan 10 hingga 15 persen di harga global langsung dipangkas oleh kenaikan biaya konversi rupiah. Inilah yang disebut *currency trap*: harga dunia turun, tapi harga di Tanjung Priok tetap tinggi.

Dari pelabuhan, kedelai diangkut truk ke pabrik atau pengrajin tahu-tempe. Truk itu menggunakan solar, yang meski disubsidi, tetap mengikuti pergerakan harga minyak dunia dalam dollar. Mesin penggiling di pabrik tahu? Suku cadangnya diimpor. Kemasan plastiknya? Bahan bakunya petrokimia yang terindeks pasar global. Sampai di sini, tahu itu belum jadi. Tapi sudah penuh dengan dollar.

Saat Negara Memilih Jalan Pintas

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melangkah lebih jauh dari sekadar debat kurs hari ini. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, banyak negara berkembang membuka pasar mengikuti resep lembaga keuangan internasional: kurangi subsidi, bebaskan impor, undang modal asing. Hasilnya, industri domestik yang belum matang tumbang bersaing dengan produk impor lebih murah, petani kehilangan daya saing, pabrik-pabrik kecil tutup, dan negara-negara itu perlahan menjadi bergantung pada impor untuk kebutuhan dasarnya, termasuk pangan.

Indonesia tidak sepenuhnya berbeda dari gambaran itu. Kita mengimpor kedelai karena selama puluhan tahun tidak ada kebijakan serius yang membangun kapasitas produksinya di dalam negeri. Bukan karena tidak bisa, tapi karena impor selalu terlihat lebih mudah dan lebih murah dalam jangka pendek.

Seorang ekonom Korea Selatan Ha-Joon Chang dalam karyanya *Kicking Away the Ladder* (2002) mengurai pola yang ia temukan dari sejarah negara-negara maju. Dalam uraiannya negara maju membangun industri domestiknya dengan proteksi dan intervensi negara yang kuat, lalu setelah berhasil, mereka menarik tangga itu dan menyarankan negara berkembang untuk membuka pasar seluas-luasnya. Negara berkembang yang mengikuti saran itu tanpa fondasi industri yang kokoh, kata Chang, akan selalu terjebak sebagai price taker, bukan price maker. Mereka tidak pernah menentukan harga. Mereka hanya menerima harga yang dibuat orang lain, dalam mata uang orang lain.

Indonesia adalah potret hidup dari peringatan itu. Produksi kedelai domestik hanya sekitar 300 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mendekati 2,8 juta ton. Defisit struktural 2,5 juta ton itu yang memaksa kita terus berbelanja di pasar global, dalam dollar, setiap tahun. Selama struktur itu tidak berubah, tidak peduli siapa presidennya dan seberapa menenangkan kalimatnya, jutaan dapur di seluruh Indonesia akan terus merasakan getaran dari Chicago Board of Trade setiap kali kurs bergerak.

Memutus Mata Rantai

Memahami rantai itu penting. Tapi pemahaman saja tidak mengubah harga tahu di pasar. Jadi apa yang bisa berubah? Bagi pemerintah, langkah pertama adalah yang paling sederhana sekaligus paling sering dihindari: jujur. Rasa aman yang sesungguhnya tidak dibangun dari kalimat-kalimat penenang di podium. Ia dibangun dari kebijakan yang nyata dan komunikasi yang tidak meremehkan kecerdasan rakyatnya. Ketika rupiah jatuh ke titik terlemah sepanjang sejarah, masyarakat tidak butuh diberi tahu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka butuh tahu apa yang sedang pemerintah lakukan untuk meresponsnya.

Selain kejujuran, pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial yang selama ini masih penuh lubang, bukan hanya untuk kelompok miskin, tapi juga untuk jutaan orang kelas menengah yang kini berada di tepi jurang kerentanan. Perlindungan kerja yang lebih kuat, akses layanan kesehatan yang tidak bergantung pada kemampuan bayar, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok yang berbasis data, bukan kepanikan, adalah fondasi rasa aman yang tidak bisa digantikan oleh satu kalimat dari atas panggung.

Bagi kita sebagai warga, kesejahteraan tidak datang dari menunggu. Membangun ketahanan finansial keluarga, sekecil apapun, adalah bentuk perlawanan paling realistis terhadap ketidakpastian. Itu berarti tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, memahami hak-hak dasar kita sebagai pekerja dan konsumen, serta aktif terlibat dalam percakapan publik tentang kebijakan yang menyangkut kehidupan kita.

Solidaritas antar warga juga rasanya menjadi sebuah keharusan disaat kondisi seperti ini. Komunitas yang saling menopang, yang berbagi informasi dan sumber daya, jauh lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibanding individu yang berjuang sendiri-sendiri. Dan di atas semuanya, kita perlu terus mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman kepada mereka yang berkuasa, karena itulah cara paling jujur seorang warga menjaga negaranya tetap bekerja untuk semua orang, bukan hanya segelintir.

Associate Partner Publication

The
Columnist
Intermediate Writer, Millennial Reader

A summary of this article was published on **The Columnist**
Mei 18, 2026.

<https://thecolumnist.id/artikel/siapa-bilang-dollar-tidak-masuk-dapur-3901>